



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK PERTAMA



Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO PERSIDANGAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,76
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₂₁)	0,12
3	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₃₁₁)	0,07
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₃₂₁)	0,20
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₄₂₁)	0,06
6	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K ₂₁₂₁)	0,22
		Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂),	1,04
7	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI (K ₂₁₂₅)	1,55

	Kegiatan / RO	Anggaran
A.	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Rp 36.340.314.000
1	002 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II	Rp 13.272.644.000
2	004 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV	Rp 12.059.743.000
3	010 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite II	Rp 4.264.042.000
4	012 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite IV	Rp 303.520.000
5	013 - RUU APBN Hasil Pertimbangan DPD RI	Rp 6.291.646.000
6	014 - RUU Lainnya Hasil Pertimbangan DPD RI Bidang Tugas Komite IV	Rp 74.250.000
7	001 - Rekomendasi Kebijakan dalam Program Pembangunan dan Keuangan Negara	Rp 74.469.000
B.	Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD	Rp 28.685.383.000
1	001- Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	Rp 5.564.610.000
2	002 - Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-undang Bidang Tugas Komite II	Rp 8.271.812.000
3	004 - Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-undang Bidang Tugas Komite IV	Rp 2.014.961.000
4	005 - Rekomendasi Pertimbangan DPD RI Dalam Pemilihan Calon Anggota BPK	Rp 69.540.000
5	002 - Laporan materi persidangan lingkup Biro Persidangan II	Rp 1.444.251.000
6	004 - Laporan Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II	Rp 1.215.107.000
7	006 - Laporan Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV	Rp 954.859.000
8	009 - Koordinasi Antar Mitra Strategis Lingkup Tugas Komite II	Rp 4.524.220.000
9	010 - Koordinasi Antar Mitra Strategis Lingkup Tugas Komite IV	Rp 4.626.023.000
C.	Pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI	Rp 33.794.270.000
1	002 - Keputusan Badan Kehormatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPD RI	Rp 923.922.000
2	003 - Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib /Tata Beracara Badan Kehormatan	Rp 1.459.583.000
3	001 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/daerah	Rp 1.821.651.000
4	001 - Rekomendasi atas Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang disampaikan Pemerintah Daerah	Rp 1.967.866.000
5	002 - Rekomendasi Pemantauan Atas Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Permasalahan yang Disampaikan Pemerintah Daerah	Rp 4.749.508.000
6	001 Rekomendasi Kebijakan Tata Tata Kelola Internal Dewan	Rp 10.257.736.000
7	001 - Laporan Pelaksanaan Tugas Panmus/Pansus DPD RI	Rp 3.793.094.000
8	002 - Koordinasi Tindaklanjuti Hasil Rekomendasi Panmus	Rp 1.085.808.000
9	003 - Kerjasama Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah	Rp 3.092.724.000
10	001 - Sidang Paripurna Bersama DPD/DPR	Rp 4.039.061.000

Jakarta, 24 Agustus 2026

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Dr. Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.
NIP. 197603062003121003